



► PILKADA 2024

KPU Peroleh Anggaran Rp33,9 Miliar

JETIS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mendapat anggaran penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024 sebanyak Rp33,9 miliar. Anggaran untuk memilih wali kota dan wakil wali kota tersebut bersumber dari APBD Kota Jogja.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Ketua KPU Kota Jogja, Hidayat Widodo menyebut anggaran tersebut mencukupi untuk pelaksanaan pilkada yang rencananya digelar 27 November 2024. "Jumlah anggaran tersebut

► Jumlah anggaran tersebut meningkat dari periode sebelumnya karena menyesuaikan inflasi dan kenaikan kebutuhan honor badan *ad hoc* sesuai standar KPU.

► Pencairan anggaran pilkada bakal dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama diperkirakan pada September 2023.

meningkat dari periode sebelumnya karena menyesuaikan inflasi dan kenaikan kebutuhan honor badan *ad hoc* sesuai standar KPU," katanya saat ditemui, Kamis (15/6).

Hidayat menjelaskan penganggaran yang sudah final tersebut mengikuti Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.41/2020 dan Surat Keputusan KPU RI No.543/2022. "Semuanya sudah sesuai mekanisme aturan yang ada dan akan kami gunakan sesuai peruntukannya," katanya.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Jogja, Siti Nurhayati menjelaskan anggaran untuk Pilkada Jogja 2014 mengalami penyesuaian. "Penyesuaian dilakukan setelah awalnya kami mengusulkan Rp35,5 miliar ke Pemkot Jogja, lalu ada efisiensi sehingga menjadi Rp33,9 miliar," ujarnya.

Efisiensi harus dilakukan dengan mengkaji ulang anggaran penggunaan protokol kesehatan Covid-19. "Setelah kami kaji, anggaran untuk protokol tersebut sudah tidak diperlukan karena

pandemi segera berubah menjadi endemi, sehingga bisa dipangkas Rp1,5 miliar menjadi Rp33,9 miliar," katanya.

Nurhayati menjelaskan pencairan anggaran pilkada bakal dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama diperkirakan pada September 2023. "September sudah mulai pencairan sebesar 40 persen untuk persiapan awal pilkada seperti sosialisasi, pembentukan badan adhoc, dan pemutakhiran data pemilih," katanya.

Penggunaan anggaran pilkada secara lebih rinci akan menunggu koordinasi dengan KPU RI. "Karena pelaksanaannya serentak se-Indonesia dan digelar setelah Pemilu 2024, maka untuk detailnya kami harus menunggu KPU RI," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005